



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mengatasi Kekurangan Tenaga Pendidik dan Fasilitas Pendidikan Tingkat Dasar di Kabupaten Pidie

Handayani¹, Musdiani², Rita Novita³

¹ Universitas Bina Bangsa Getsempena, Banda Aceh, Indonesia, hy993323@gmail.com

² Universitas Bina Bangsa Getsempena, Banda Aceh, Indonesia, musdiani@bbg.ac.id

³ Universitas Bina Bangsa Getsempena, Banda Aceh, Indonesia, ritanovita@bbg.ac.id

Corresponding Author: hy993323@gmail.com

Abstract: *This research aims to describe and analyze the contribution of the Department of Education and Culture in overcoming the shortage of teaching staff and lack of basic level facilities in Pidie Regency for the period 2019 - 2024. This research uses a qualitative research approach, with the type of research being descriptive. The sample for this research was 74 elementary schools in Pidie Regency. Data collection techniques in this research used interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique in this research uses four stages, namely data collection, data reduction, display and data verification. Research shows that the Pidie Regency Education and Culture Office for the 2019-2024 period is overcoming the shortage of basic education personnel by quickly inducting new personnel to replace retirees, increasing human resources through supervision, recruiting P3K, and using contract, honorary and community service teachers. To overcome the lack of educational facilities, they collect information on school needs, provide facilities, provide budget assistance, and monitor their use according to learning needs.*

Keyword: *Department of Education and Culture, Education Staff, Educational Facilities.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik dan kekurangan fasilitas tingkat dasar di Kabupaten Pidie periode 2019 – 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Sampel penelitian ini yaitu 74 Sekolah Dasar di Kabupaten Pidie. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahapan, yaitu data collection, data reduction, display dan verifikasi data. Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie periode 2019-2024 mengatasi kekurangan tenaga kependidikan dasar dengan pelantikan cepat tenaga baru sebagai pengganti pensiunan, peningkatan SDM melalui pengawasan,

rekrutmen P3K, dan penggunaan guru kontrak, honor, serta bakti. Untuk mengatasi kekurangan fasilitas pendidikan, mereka mengumpulkan informasi kebutuhan sekolah, mengadakan fasilitas, memberikan bantuan anggaran, dan mengawasi pemanfaatannya sesuai kebutuhan pembelajaran.

Kata Kunci: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tenaga Pendidik, Fasilitas Pendidikan.

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah terus diupayakan baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Karena peningkatan mutu pendidikan di tingkat SD secara strategis akan membawa dampak pada peningkatan mutu pendidikan pada jenjang selanjutnya (Akmaluddin & Mutiawati, 2018; Syarifuddin et al., 2024). Untuk merealisasikan upaya peningkatan mutu pendidikan tersebut, pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota terus mengambil peran untuk memberikan kontribusi, termasuk dalam hal mengatasi masalah tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan di sekolah tingkat dasar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dan pembinaan pendidikan dan kebudayaan. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat daerah kabupaten tentu tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab pemeritan kabupaten itu sendiri, termasuk dalam hal masalah sekolah.

Namun, kenyataannya di lapangan terkadang pemerintah lambat dalam menanggapi persoalan sekolah, baik dalam menangani tenaga kependidikan maupun fasilitas yang rusak, khususnya di Kabupaten Pidie. Padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diatur pada pasal 46 tentang pendanaan pendidikan (tanggung jawab pendanaan) yaitu: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Berdasarkan pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa pemerintah bertanggung jawab pada kerusakan yang dialami oleh sekolah-sekolah yang ada, namun masih sering sebagian daerah mengabaikan dan lambat dalam menanggapi persoalan yang ada. Sehingga menimbulkan kerugian bagi para siswa, yaitu terlambatnya proses belajar mengajar karena tidak layak fasilitas sekolah yang mereka gunakan serta tidak didukung oleh tenaga Pendidikan yang kompeten.

Sekalipun masih terlihat banyak sekolah yang memiliki keterbatasan dalam hal tenaga kependidikan yang kompeten sesuai standar yang ada serta fasilitas yang belum memadai, namun tidak sedikit pula di tingkat kabupaten/kota yang dijumpai kualitas Pendidikan baik tenaga kependidikan maupun fasilitas yang sudah sangat baik. Namun, jika dilihat secara cermat, masih tidak dilakukan secara merata, dimana hanya sekolah-sekolah di sekitaran pusat kota kabupaten saya yang memiliki tenaga kependidikan dan fasilitas yang baik, sedangkan yang jauh dari perkotaan sering terabaikan. Maka karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku elemen pemerintah memiliki peran penting untuk memberikan kontribusinya dalam menangani masalah keterbatasan tenaga kependidikan dan fasilitas Pendidikan, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie.

Terkait kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal menangani tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan sudah terdapat beberapa kajian sebelumnya, seperti penelitian (Fadhil & Ilhamsyah, 2022) yang menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas

pendidikan, di antaranya melalui inovasi-inovasi pendidikan seperti smart sekolah, tuntas BTQ, tuntas calistung, literasi, dan pemberian bantuan media pembelajaran. (Fadhil & Ilhamsyah, 2022) dalam kajiannya menyebutkan bahwa peran Dinas Pendidikan Aceh Barat dalam peningkatan mutu sekolah dasar dengan meningkatkan sumber daya manusia guru sumber daya, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan kurikulum. Begitu pula hasil penelitian (Juliana et al., 2020) yang menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemenuhan fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan dengan rehabilitasi sekolah-sekolah, sosialisasi wajib belajar sembilan tahun, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu dan lomba minat bakat dan kreatifitas siswa.

Adanya kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi masalah pendidikan di tingkat kabupaten, terutama dalam hal mengatasi keterbatasan tenaga kependidikan dan fasilitas juga menarik dilakukan di Kabupaten Pidie. Hal ini dikarenakan hasil pengamatan awal peneliti di beberapa sekolah tingkat dasar masih terdapat berbagai kekurangan dalam hal fasilitas belajar yang belum sesuai standar di Kabupaten Pidie. Begitu pula tenaga kependidikan yang sebagian sekolah dasar belum mencukupi baik dari segi jumlah maupun standar komptenesinya. Selain itu di Kabupaten Pidie juga terlihat belum berimbangnyanya penyebaran tenaga Pendidikan dan fasilitas belajar antara sekolah yang jauh dari pusat kota dengan sekolah yang berada di sekitara kota kabupaten. Oleh karena itu, kajian ini ingin melihat lebih jauh selama ini peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Pidie tersebut.

METODE

Metode penelitian adalah rencana tentang cara melakukan penelitian itu, sehingga desain penelitian sangat erat hubungannya dengan proses penelitian, dengan katya lain desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Zaini et al., 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut (Moleong, 2017) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. (Sahir, 2022) mendefinisikan metode kualitatif adalah metode dengan peroses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian. Sementara itu Bogdan dan Taylor dalam (Zaini et al., 2023) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun jenis penelitian ini bersifat deskriptif. (Sugiyono, 2019) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah metode dalam meneliti status sekeompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif ialah dikarenakan penelitian ini hanya ingin memaparkan dalam uraian kata-kata terkait kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Pidie serta kendala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Pidie tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada tahapan ini dipaparkan temuan penelitian terkait kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Pidie periode 2019 – 2024 yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie itu sendiri maupun dengan pihak sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada uraian di bawah ini.

Kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mengatasi Kekurangan Tenaga Pendidik Tingkat Dasar di Kabupaten Pidie periode 2019 – 2024

Terkait kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Pidie periode 2019 – 2024 dalam hal ini mencakup tenaga kependidikan yang terdiri dari kepala sekolah, guru, wakil kepala sekolah, pustakawan, laboran, tata usaha, pelatih ekstrakurikuler dan petugas keamanan sekolah.

Langkah utama yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik tingkat dasar di Kabupaten Pidie periode 2019 – 2024 ialah menyegerakan pelantikan tenaga pendidikan sebagai pengantik tenaga pendidikan yang sudah memasuki masa pensiunan, sebagai mana keterangan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie di bawah ini.

Hal yang paling penting kami perhatikan dalam mengatasi kekurangan tenaga kependidikan di tingkat sekolah dasar yang ada di Kabupaten Pidie ini ialah melakukan pelantikan melalui Bupati terhadap pergantian kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya yang sudah memasuki masa pensiun, seperti yang sudah dilakukan pada tahun 2021 dimana Bupati Pidie bapak Roni Ahmad SE atau Abusyik (Alm) melantik ratusan kepala sekolah di Dinas Pendidikan (Disdik) Pidie. Ratusan kepala sekolah baik tingkat TK, SD, dan SMP (Wawancara: Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, 2 Juni 2024).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kontribusi utama yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam mengatasi kekurangan tenaga kependidikan ialah dengan segera melakukan pelantikan tenaga kependidikan baru sebagai pengganti tenaga kependidikan yang sudah masuk masa pensiun. Hal ini sebagai mana terlihat pada tahun 2021 dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie melalui Bupati Pidie melakukan pelantikan kepala sekolah seperti terlihat pada Gambar 1.



(Sumber: <https://ppid.pidiekab.go.id>, diakses 2024)

Gambar 1. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Sekolah, 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa adanya upaya mengatasi kekurangan tenaga kependidikan, khususnya kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie. Bahkan hal ini diperkuat oleh keterangan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie yakni sebagai berikut: *Seingat saya terdapat puluhan kepala sekolah TK, SD, dan SMP telah memasuki pensiun pada bulan Januari 2021, sehingga harus segera dilantik kepala sekolah yang baru. Kepala sekolah yang dilantik berjumlah 162 orang. Rinciannya, 19 kepala TK, 126 kepala SD, dan 17 kepala SMP. Sehingga saat ini tidak ada lagi sekolah, baik TK, SD dan SMP yang kekosongan kepala sekolah* (Wawancara: Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, 2 Juni 2024).

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa hingga saat ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie telah berkontribusi besar dalam mengatasi kekurangan tenaga kependidikan, yang tidak hanya terfokus kepada tenaga administrasi, melainkan juga kepemimpinan kepala sekolah serta tenaga pendidik atau guru.

Langkah lainnya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidikan di tingkat sekolah dasar ialah tidak hanya membatasi pada jumlah tenaga kependidikan, melainkan juga melakukan pengawasan terhadap kualitas kerja tenaga kependidikan, sebagai mana keterangan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie di bawah ini.

Kami tidak hanya berkontribusi dalam hal peningkatan jumlah tenaga kependidikan, melainkan juga mengatasi masalah tenaga pendidik dengan mengawasi kegiatan-kegiatan Pendidikan di tingkat sekolah dasar dengan mengadakan supervisi silang guna mendongkrak kualitas pendidikan ke arah yang semakin baik (Wawancara: Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, 5 Juni 2024).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pidie dalam mengatasi kekurangan tenaga kependidikan tidak hanya terfokus pada aspek jumlah, melainkan juga kualitas tenaga pendidik dengan melakukan supervisi silang sebagai salah satu upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie untuk mendongkrak kualitas pendidikan yang semakin baik. Karena pembinaan kepala sekolah dan para guru, juga berimbas pada siswa dan akhirnya peningkatan mutu pendidikan bisa terwujud secara menyeluruh.

Kegiatan supervisi tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie saja, melainkan juga melibatkan 23 pengawas sekolah melakukan supervisi silang terhadap 279 Sekolah Dasar (SD). Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten berjuduk "*Pang Ulee Buet Ibadat, Pang Ulee Hareukat Meugoe*". Terkait pelaksanaan supervisi dan pengawasan dalam rangka mengatasi masalah tenaga kependidikan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



(Sumber: Waspada, diakses, 2024.)

Gambar 2 Kasi Kurikulum SD Disdik Kabupaten Pidie Saat Mendampingi Pengawas Sekolah Melakukan Supervisi Silang di SDN Blang Kula, Kecamatan Grong-Grong

Gambar di atas sebagai bentuk kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam mengatasi kekurangan tenaga kependidikan melalui kegiatan supervisi silang yang melibatkan sebanyak 23 orang pengawas sekolah yang dirunkan untuk mengunjungi lima sekolah per hari. Sebagai tindak lanjut supervisi ini dipaparkan atau dipersentasikan di Oproom Kantor bupati Pidie. Semua kepala sekolah dan pengawas diundang pada saat dilaksanakannya acara pemaparan itu. Dalam kegiatan itu nantinya para kepala sekolah diberikan raport. Dengan rapor tersebut, para kepala sekolah bisa melihat kelebihan dan kekurangan sekolah yang dipimpinnya.

Kontribusi lainnya yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam mengatasi kekurangan dan keterbatasan tenaga kependidikan, seperti guru ialah melakukan perekrutan melalui jalur P3K baik guru TK, SD, dan SMP, sebagai mana keterangan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie yakni sebagai berikut: *Langkah terbaik yang juga pernah kami ambil dalam mengatasi keterbatasan tenaga kependidikan ditingkat dasar ialah dengan menambah jumlah guru melalui perekrutan program P3K. Saat ini, pemerintah aktif merekrut guru melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), sekalipun ternyata belum mampu menutupi kekurangan guru, terutama sekolah pedalaman di Pidie* (Wawancara: Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, 8 Juni 2024).

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie juga telah berkontribusi dalam mengatasi kekurangan tenaga kependidikan khususnya guru, salah satunya melalui program P3K dengan melantik guru-guru baru untuk menjadi tenaga pengawai di lingkungan Kabupaten Pidie. Sekalipun program P3K belum mampu mengatasi keterbatasan tenaga kependidikan secara maksimal.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam mengatasi kekurangan tenaga kependidikan juga melakukan pemakaian jasa guru kontrak, honor dan guru bakti, seperti ungkapan informan di bawah ini: *Untuk menutupi kekurangan guru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pidie, juga harus memakai jasa guru kontrak, honor dan bakti. Saat ini, jumlah guru yang telah menjadi PNS dan guru kontrak, honorer, dan bakti di Pidie mencapai 8.132 orang. Jumlah guru yang telah diangkat menjadi PNS 3.432 orang. Sementara guru kontrak, honorer, dan bakti yang aktif mengajar 4.701 orang. Adapun jumlah guru SD berstatus PNS 2.182 orang. Sedangkan guru kontrak, honorer, dan bakti yang mengajar di SD 2.656 orang* (Wawancara: Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, 8 Juni 2024).

Pernyataan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie di atas, maka dapat diketahui bahwa saat ini guru kelas yang masih kurang di SD ialah guru mata Pelajaran seni, prakarya, dan penjas dan hampir semua sekolah kekurangan guru mata pelajaran tersebut. Meski telah dilakukan perekrutan guru melalui P3K untuk Pidie bahkan tahap pertama telah lulus guru P3K 249 orang, tahap kedua masih dalam proses pendataan jumlah guru yang lulus dan tahap ketiga belum dilakukan perekrutan. Namun, perekrutan guru P3K itu belum menutupi kekurangan guru sekitar 4.000 orang. Hal ini disebabkan jumlah murid TK, SD dan SMP di Pidie sekitar 36.000 orang. Jadi selama ini proses belajar mengajar di sekolah dibantu guru kontrak, honor, dan bakti. Guru yang non PNS itu dibayar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dan sekolah melalui dana BOS.

Berdasarkan uraian di atas terkait kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi kekurangan fasilitas pendidik tingkat dasar di Kabupaten Pidie periode 2019 – 2024 dilakukan dengan pelantikan tenaga kependidikan baru secara cepat sebagai pengganti tenaga kependidikan yang sudah masuk masa pensiun, melakukan peningkatan SDM tenaga kependidikan melalui pengawasan dan supervisi silang, melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui program P3K dan memanfaatkan jasa guru kontrak, honor dan guru bakti

yang dibayar langsung oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dan pihak sekolah.

Kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mengatasi Kekurangan Fasilitas Pendidik Tingkat Dasar di Kabupaten Pidie periode 2019 – 2024

Kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya dilihat dari aspek pemenuhan tenaga kependidikan, melainkan selama ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie juga sudah berkontribusi dalam mengatasi kekurangan fasilitas pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Pidie, hal ini sebagai mana terlihat selama periode 2019 – 2024. Adapun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie hal ini dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian dan pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan serta pengawasan dan pertanggung jawaban.

Langkah utama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam mengatasi keterbatasan fasilitas ekolah dasar ialah mengumpulkan informasi terkait kebutuhan sekolah untuk dibahas terkait fasilitas yang mendesak harus dipenuhi. Langkah ini dilakukan karena tidak semua usulan dari sekolah dapat terpenuhi karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh sekolah. Dalam hal ini salah satu kepala sekolah dasar di Kabupaten Pidie mengakui sebagai berikut: *Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Pidie dalam memenuhi fasilitas sekolah dibantu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie melalui pemberian sumber dana pengadaan sarana dan prasarana sekolah berasal dari dana BOS. Oleh karena itu pembahasan prioritas sarana dan prasarana sekolah yang akan dibeli harus dilakukan agar benar-benar sesuai dengan kondisi dan dana yang ada sehingga proses belajar mengajar dapat tetap berlangsung dengan efektif dan efisien bagi pelaksanaan Pendidikan di sekolah* (Wawancara: Kepala Sekolah, Juni 2024).

Langkah selanjutnya setelah penentuan prioritas pengadaan sarana dan prasarana sekolah disetujui oleh kesepatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dibuat surat keputusan hasil rapat untuk penentuan pengadaan sarana dan prasarana yang ditanda tangani oleh kepala dinas untuk diadakan pengadaan. Pengadaan fasilitas Pendidikan merupakan kegiatan membeli atau mengadakan fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar yang ada di Kabupaten Pidie. Hal ini sebagai mana keterangan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie yakni sebagai berikut: *Pengadaan sarana dan prasarana di SD yang ada di Kabupaten Pidie dilakukan dengan menggunakan beberapa dana. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah dasar dilakukan secara matang. Beberapa tahap yang dilakukan dalam pengadaan sarana dan prasarana di SD yaitu pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan skala prioritas, hal tersebut ditempuh agar tidak menelan biaya banyak dan sarana dan prasarana yang dibeli akan sesuai dengan zaman. Tahap selanjutnya yaitu penentuan skala prioritas dilakukan oleh tim yang bekerja sama dalam pengadaan sarana dan prasarana, tim tersebut terdiri dari kepala sekolah, koordinator sarana dan prasarana, serta bendahara sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana di sekolah ini menggunakan dana iuran komite sekolah, DPP, dan pemerintah* (Wawancara: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, 10 Juni 2024).

Pengadaan fasilitas pendidikan di sekolah dilakukan dengan cara drooping dari pemerintah, membeli, sumbangan dari wali murid, dan membuat sendiri. Terkait hal ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie jugamengemukakan sebagai berikut: *Fasilitas sekolah yang pernah didrooping dari pemerintah yaitu berupa buku-buku pelajaran, buku penunjang dan alat-alat olah raga. Drooping ini biasanya memerlukan proses yang lama karena harus membuat proposal pengadaan dahulu. Proposal yang diajukan ini kadang-kadang tidak langsung disetujui oleh dinas karena mengalami kesalahan, sehingga harus diperbaiki kembali, hal ini kadang terjadi berulang-ulang*

sehingga menyebabkan memakan waktu lama dalam pembuatan proposal ini (Wawancara: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, 12 Juni 2024).

Untuk memenuhi fasilitas sekolah, karena tidak semua sarana belajar dapat bantuan dari pemerintah maka sekolah dasar yang ada di Kabupaten Pidie mengadakan dan mempertimbangkan untuk membeli barang-barang yang bisa digunakan untuk membuat alat peraga sederhana.

Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam rangka pemenuhan sarana sekolah dengan cara membeli, yaitu membeli berupa barang habis pakai seperti kapur, spidol, tinta spidol, pensil, pena, penghapus, kertas, buku tulis, alat kebersihan, buku pelajaran, alat-alat olah raga, dan lain-lain. Pembelian sarana dan prasarana ini dilakukan setiap per triwulan yaitu setelah juga dapat melakukan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah dengan cara meminjam atau menyewa. Hal ini dapat dilakukan jika terdesak penggunaannya misalnya ada pertemuan di sekolah yang pesertanya banyak sehingga memerlukan sarana dan prasarana yang lebih dari biasanya, sarana dan prasarana yang dapat dipinjam atau disewa misalnya kursi dan meja (Wawancara: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, 7 Juni 2024).

Keterangan di atas menunjukkan kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam mengatasi kekurangan fasilitas Pendidikan dilakukan dengan pengadaan fasilitas sekolah di Sekolah Dasar tidak hanya mengharapkan bantuan pemerintah, melainkan juga dengan membeli dan membuat sendiri untuk diserahkan kepada pihak sekolah yang membutuhkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pihak sekolah seharusnya bisa menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh guru dan siswa dalam pembuatan sarana dan prasarana ini. Tapi karena kadang-kadang lambat terpenuhi maka guru lebih suka meminta anak membawa sendiri bahan-bahan tersebut dari rumah. Sementara itu, salah satu kepala sekolah dasar mengemukakan sebagai berikut: *Selama ini kontribusi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie ialah pengadaan fasilitas sekolah dipenuhi permintaan sekolah. Hal ini karena tidak semua yang tidak lepas pula dari keterlibatan kepala sekolah. Kepala sekolah harus tegas dan berani untuk mengambil keputusan dalam memilih alternatif pemenuhan fasilitas sekolah dengan meminta bantuan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie* (Wawancara: Kepala Sekolah, 11 Juni 2024).

Ungkapan di atas dapat diketahui bahwa pada tahap pengadaan fasilitas sekolah di SD dalam Kabupaten Pidie melibatkan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie agar mendapatkan pengambilan kebijakan terbaik sehingga fasilitas dapat terpenuhi untuk kebutuhan belajar siswa.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam memberikan kontribusinya mengatasi kekurangan fasilitas Pendidikan di tingkat sekolah dasar dilakukan dengan inventarisasi fasilitas, yakni melakukan kegiatan pencatatan semua fasilitas di sekolah secara teratur dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal ini pihak Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mengemukakan bahwa: *Selama ini pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie juga melakukan penginventarisasian fasilitas di SD. Inventarisasi dilakukan apabila fasilitas Pendidikan di sekolah yang bersangkutan baru datang, hal tersebut dilakukan agar mudah saat melakukan pendistribusian sarana dan prasarana. Setelah dilakukan pencatatan pada awal, selanjutnya apabila koordinator atau pihak sekolah meminta fasilitas untuk digunakan, maka pihak sekolah tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan penginventarisasian terhadap fasilitas yang diberikan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie* (Wawancara: Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), 14 Juni 2024).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa peran penting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie untuk membantu penyediaan fasilitas Pendidikan di sekolah. Dalam inventarisasi hanya dilakukan terhadap barang masuk.

Kontribusi lainnya yang diberikan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam mengatasi keterbatasan fasilitas Pendidikan di sekolah dasar ialah pendistribusian yang merupakan kegiatan menyalurkan atau memindahkan barang dari penanggungjawab terhadap unit-unit yang membutuhkan sarana dan prasarana tersebut. Terkait hal ini salah satu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie mengemukakan sebagai berikut: *Pendistribusian fasilitas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie kepada pihak SD dalam Kabupaten Pidie dilakukan secara langsung. Namun fasilitas tersebut akan didistribusikan terhadap masing-masing sekolah. Pendistribusian tersebut akan dilakukan jika fasilitas tersebut telah dicatat oleh koordinator fasilitas sekolah* (Wawancara: Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, 13 Juni 2024).

Hasil temuan penelitian di salah satu sekolah dasar terkait pendistribusian fasilitas diakui oleh salah satu guru yang tergabung dalam Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bahwa: *Pendistribusian dilakukan oleh pihak sekolah ditujukan kepada guru hendaknya bisa dilakukan pada awal semester sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pendistribusian sarana atau media-media pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan guru kelas sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal* (Wawancara: Komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), 14 Juni 2024).

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah dasar yang ada di Kabupaten Pidie berupa media pembelajaran, buku bacaan dan fasilitas belajar sesuai kebutuhan siswa yang ada di setiap sekolah.

Tidak hanya sampai pada batas pemberian bantuan kelengkapan fasilitas pendidikan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie juga berkontribusi dalam mengatasi keterbatasan fasilitas pendidikan dengan upaya melakukan pengawasan dengan berupaya mengumpulkan dan menyajikan informasi untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap fasilitas yang digunakan. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie mengemukakan terkait tahapan pelaporan ini sebagai berikut: *Pengevaluasian fasilitas pendidikan yang telah diberikan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie kepada pihak sekolah dilakukan melalui beberapa tahap dan melibatkan pihak tertentu. Pengevaluasian dilakukan setiap semester dan sesudah kegiatan dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar pada semester berikutnya dapat memperbaiki kegiatan yang belum terlaksana. Namun juga ada pengevaluasian yang dilakukan setiap satu bulan sekali, pengevaluasian tersebut dilakukan pada saat rapat koordinasi rutin* (Wawancara: Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, 16 Juni 2024).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa fasilitas Pendidikan di sekolah yang disediakan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie tidak hanya digunakan begitu saja, melainkan adanya upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dan pihak sekolah dalam melakukan pengawasan agar fasilitas tidak cepat mengalami kerusakan.

Pembahasan

Pada bagian ini dijelaskan hasil analisis penulis terhadap temuan penelitian yang menyangkut kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi kekurangan tenaga kependidikan dan fasilitas pendidik tingkat dasar di Kabupaten Pidie periode 2019 – 2024 dengan mengkaitkan pada teori serta kajian-kajian yang relevan.

Kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mengatasi Kekurangan Tenaga Pendidik Tingkat Dasar di Kabupaten Pidie

Kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik sudah baik yang dapat dilihat dari strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, kemudian berbagai keputusan dan program untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, dan bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meningkatkan kualitas dan kompetensi dari tenaga pendidik yaitu guru sesuai dengan program yang dilaksanakan hanya saja perlunya dioptimalkan kembali implementasinya di lapangan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi kekurangan tenaga kependidikan tingkat dasar di Kabupaten Pidie periode 2019 – 2024 dilakukan dengan pelantikan tenaga kependidikan baru secara cepat sebagai pengganti tenaga kependidikan yang sudah masuk masa pensiun, melakukan peningkatan SDM tenaga kependidikan melalui pengawasan dan supervisi silang, melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui program P3K dan memanfaatkan jasa guru kontrak, honor dan guru bakti yang dibayar langsung oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dan pihak sekolah.

Hal ini didukung oleh penelitian (Bayu, 2021) yang menyatakan bahwa dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang ada di Kota Pontianak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan strategi yang tepat serta sangat baik, hanya perlu lebih di optimalkan lagi. Salah satu kendala terbesar yang di hadapi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang ada di Kota Pontianak yaitu pemerataan penempatan tenaga pendidik yang belum menyeluruh dikarenakan pengaruh jumlah penerimaan formasi PNS serta moratorium, kurangnya tenaga pendidik yang sesuai dengan bidangnya dalam mengajar, masih banyak tenaga pendidik yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi atau tenaga pendidik profesional dan juga tenaga pendidik yang berstatus PNS yang masih kurang.

Kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mengatasi Kekurangan Fasilitas Pendidikan Tingkat Dasar di Kabupaten Pidie

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam hal mengatasi kekurangan fasilitas pendidikan di sekolah dasar telah memberikan kontribusi semaksimal mungkin. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan mulai ditahap pengumpulan informasi terkait kebutuhan sekolah untuk dibahas terkait fasilitas yang mendesak harus dipenuhi dan pemberian dana pengadaan fasilitas sekolah.

Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie juga aktif mengadakan kegiatan pengadaan fasilitas pendidikan di sekolah dengan cara *drooping* dari pemerintah, membeli fasilitas untuk di sumbangkan kepada sekolah yang membutuhkan. Kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam mengatasi kekurangan fasilitas pendidikan juga dilakukan dengan pengdaan fasilitas sekolah meminta pihak sekolah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh guru dan siswa dalam pembuatan sarana dan prasarana ini dengan dana BOS yang sudah diberikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam memberikan kontribusinya mengatasi kekurangan fasilitas Pendidikan di tingkat sekolah dasar dilakukan dengan inventarisasi fasilitas, yakni melakukan kegiatan pencatatan semua fasilitas di sekolah secara teratur dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Peran penting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie untuk membantu penyediaan fasilitas Pendidikan di sekolah. Dalam inventarisasi hanya dilakukan terhadap barang masuk.

Kontribusi lainnya yang diberikan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dalam mengatasi keterbatasan fasilitas Pendidikan di sekolah dasar ialah pendistribusian yang merupakan kegiatan menya lurkan atau memindahkan barang dari penanggungjawab terhadap unit-unit yang membutuhkan sarana dan prasarana tersebut. Pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah dasar yang ada di Kabupaten Pidie berupa media pembelajaran, buku bacaan dan fasilitas belajar sesuai kebutuhan siswa yang ada di setiap sekolah. Tidak hanya sampai pada batas pemberian bantuan kelengkapan fasilitas pendidikan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie juga berkontribusi dalam

mengatasi keterbatasan fasilitas pendidikan dengan upaya melakukan pengawasan dengan berupaya mengumpulkan dan menyajikan informasi untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap fasilitas yang digunakan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian membuktikan bahwa kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi kekurangan tenaga kependidikan tingkat dasar di Kabupaten Pidie periode 2019 – 2024 dilakukan dengan pelantikan tenaga kependidikan baru secara cepat sebagai pengganti tenaga kependidikan yang sudah masuk masa pensiun, melakukan peningkatan SDM tenaga kependidikan melalui pengawasan dan supervisi silang, melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui program P3K dan memanfaatkan jasa guru kontrak, honor dan guru bakti. Kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengatasi kekurangan fasilitas pendidikan tingkat dasar di Kabupaten Pidie periode 2019 – 2024 dilakukan dengan mengumpulkan informasi sekolah yang paling membutuhkan fasilitas pendidikan, melakukan kegiatan pengadaan fasilitas, pemberian bantuan anggaran fasilitas, pengawasan terhadap fasilitas yang sudah diberikan agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut.

REFERENSI

- Akmaluddin, & Mutiawati. (2018). Program Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Lulusan pada SMP Babul Magfirah Aceh Besar. *Journal of Education Science*, 4(2), h. 42-50.
- Bayu, V. C. V. Van. (2021). *Strategi dinas pendidikan dan kebudayaan dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik di kota Pontianak provinsi Kalimantan Barat*. 1–12.
- Fadhil, F., & Ilhamsyah, F. (2022). Peran Dinas Pendidikan Aceh Barat Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar (Studi Kasus SDN Lancong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat). *Journal of Public Service*, 2. <http://jurnal.utu.ac.id/JPS/article/view/5013>
- Juliana, Deliana, E., & Artina, D. (2020). PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM PEMENUHAN FASILITAS SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. *JOM Fakultas Hukum*, VII, 1–16.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (Issue 2017). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Bandung: Alfabeta* (Vol. 8, Issue 5).
- Syarifuddin, S., Rahmattullah, R., & Akmaluddin, A. (2024). Efektifitas Penggunaan Dana Bosp Pada Sekolah Dasar Negeri Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Berdasarkan Model Cipp Di Kabupaten Aceh Besar. *Visipena*, 53–74. <https://ejournal.bbg.ac.id/visipena/article/view/2556%0Ahttps://ejournal.bbg.ac.id/visipena/article/download/2556/1552>
- Zaini, P. M., Zaini, P. M., Saputra, N., Penerbit, Y., Zaini, M., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue May).